

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI
PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI**

Mariane Olivia Delanova

Abstract

After President Joko Widodo won in general electoral in 2014, he has making many decisions, include decision on foreign policy. One of his priorities of foreign policy is on economic sector. President has been implementing Indonesia's foreign policy, which is improving economic diplomacy to achieve national interests of Indonesia, especially in the era of free trade and globalization. This paper aims at analyzing Indonesia's foreign policy in the era of President Joko Widodo, focus on economic diplomacy of Indonesia, and include the change on paradigm of Ministry of foreign affairs. This paper also tries to describe the obstacles in practicing foreign policy of Indonesia in the era of President Joko Widodo.

Keywords: *economic diplomacy, foreign policy, Indonesia's national interests.*

Pendahuluan

Politik luar negeri Indonesia dan kebijakan luar negeri Indonesia telah dimulai sejak perjuangan Indonesia memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, arah politik luar negeri dan kebijakan luar negeri lebih diutamakan kepada perjuangan diplomasi untuk memperoleh pengakuan dan dukungan atas kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang baru lepas dari kolonialisme Belanda.

Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan, di mana negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir (Suranta Abd. Rahman, jurnal Wacana, Vol. 9 No. 2, Oktober 2007 (154—172) “Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947”), Indonesia dapat lebih memainkan peran di dunia internasional. Dimulailah berbagai langkah kebijakan luar negeri oleh Indonesia sebagai aplikasi dan implementasi dari politik luar negeri Indonesia, yang ditujukan sebagai upaya mencapai kepentingan nasionalnya.

Politik Luar Negeri

Menurut Miriam Budiarjo berpendapat mengenai politik luar negeri sebagai kebijakan (*policy*) merupakan sebuah kumpulan yang ditetapkan oleh pelaku atau kelompok dalam upaya yang memiliki tujuan, di mana kebijakan tersebut

memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya (Miriam Budiarjo, 2003). Politik luar negeri selalu terkait kepada dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal suatu negara. Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh C. C. Rodee (dkk), politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang dipakai atau digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Sedangkan, pemahaman politik luar negeri yang diberikan oleh Coulumbis dan Wolfe adalah sintesis dari kepentingan nasional dengan *power* dan juga kapabilitas. Dimana, tujuannya adalah untuk meraih kepentingan nasional. Definisi lain juga disampaikan oleh S.L. Roy bahwa politik luar negeri sebagai perwujudan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.

Dalam menetapkan politik luar negeri, sebuah negara akan terlebih dahulu melakukan langkah perumusan politik luar negerinya. Langkah-langkah dalam proses perumusan politik luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Mem-*breakdown* pertimbangan kepentingan nasional sehingga memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berksaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
3. Melakukan analisa terhadap kemampuan atau kapabilitas nasional untuk menjangkau atau mencapai hasil yang dikehendaki;

4. Mengembangkan dan membuat perencanaan atau strategi untuk menggunakan kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan tindakan atau mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Secara berkala, meninjau dan mengevaluasi perkembangan yang telah dan sedang berlangsung dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan (Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik luar negeri pada praktiknya akan diaplikasikan ke dalam bentuk kebijakan luar negeri.

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri sebuah negara. Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri adalah sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya (James N. Rosenau, 1976). Sedangkan menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri mencakup keseluruhan tindakan dan aktivitas negara yang diambil dalam rangka merespon kondisi lingkungan eksternalnya untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya tersebut, dengan mempertimbangkan

berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (K.J. Holsti, 1992).

Sementara itu, Jack C. Plano mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri didesain dan dikembangkan untuk meraih tujuan nasional (KJ Holsti dan Roy Olton, 1999). Tujuan nasional yang hendak diraih dengan penetapan kebijakan luar negeri adalah formulasi konkret dan dibuat dengan merelevansikan kepentingan nasional atas situasi internasional yang sedang berlangsung serta mempertimbangkan kekuasaan atau kemampuan (*power*) yang dimiliki oleh negara tersebut untuk mencapainya. Tujuan dirumuskan, dipilah dan diputuskannya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan dan selanjutnya dikontrol adalah untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) mengenai persoalan tertentu di lingkungan internasional.

Dari penjelasan mengenai konsep kebijakan luar negeri sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah aplikasi dari keputusan politik luar negeri suatu negara dan juga sebagai alat sebuah negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasional dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan eksternal dan menghiraukan kondisi internal. Dengan demikian, sebuah kebijakan luar negeri yang dirumuskan dan kemudian diputuskan terkait erat dengan konsep tujuan dan kepentingan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohtar Mas'oed bahwa

kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, meskipun kepentingan nasional suatu bangsa ditentukan oleh siapa yang berkuasa (Mas'oed, 1994).

Kepentingan nasional adalah konsep abstrak yang meliputi berbagai keinginan/kategori dari suatu negara yang berdaulat atau dapat dikatakan abstraksi keinginan sebuah negara. Sedangkan, tujuan nasional dapat dibedakan atas tujuan nasional vital, yaitu tujuan nasional yang mutlak harus ada karena menyangkut keberlangsungan hidup dan kehidupan bangsa tersebut dan tujuan nasional variabel, yaitu tujuan nasional yang dapat diubah dan tidak mutlak disesuaikan dengan kepentingan nasional sebuah negara. Contoh tujuan nasional variabel adalah pengembangan olah raga, kebudayaan, pertukaran pelajar dan sebagainya.

Tujuan nasional vital terbagi lagi berupa integrasi nasional (*national integrity*), yaitu integrasi politik bahwa negara tersebut harus independen. Selanjutnya adalah integrasi territorial (*territorial integrity*) berupa adanya kesatuan wilayah. Tujuan nasional vital lainnya adalah keamanan nasional (*national security*) dan kesejahteraan nasional (*national welfare/economic welfare*). Kedua tujuan nasional ini dapat dicapai melalui kerjasama bilateral maupun multilateral dan ketiga tujuan nasional yang telah disebutkan di atas sebagai tujuan nasional yang mutlak diperjuangkan dan dicapai sebuah negara. Tujuan nasional vital yang selanjutnya adalah

tujuan ideologi atau tujuan kekuasaan (*ideology/power*). Tujuan nasional tersebut bersifat prestisius dan biasanya merupakan tujuan nasional yang dituju oleh negara-negara adikuasa.

Konsep lain yang melekat dengan kebijakan luar negeri sebagai upaya konkret politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis (Hans J. Morgenthau, 2010), yaitu:

1. *Core/basic/vital interest* adalah kepentingan nasional yang sangat berharga, sehingga negara (dan rakyatnya) bersedia untuk berperang dalam mempertahankan ataupun mencapainya. Sebagai contoh adalah tindakan melindungi daerah/wilayahnya (*sovereignty*) dan upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara (*ideology*)
2. *Secondary interest* merupakan berbagai kepentingan yang ingin diraih setiap negara, tetapi tidak sampai bersedia berperang untuk mempertahankan dan mencapainya, di mana terdapat alternatif lain untuk mencapainya, yaitu melalui jalan perundingan. Sebagai contoh adalah negosiasi perdagangan.

Rosenau juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan keterhubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternalnya, yaitu pertama kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Hal ini berarti

bahwa kebijakan luar negeri sebagai sebuah pedoman bagi para pembuat keputusan atau elit (*decision maker*) untuk membuat keputusan dan tindakan yang relevan dengan perubahan lingkungan eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan dengan berdasarkan kepada orientasi, terdiri atas sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang akan menentukan posisi negara dalam politik internasional.

Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*) berarti kebijakan luar negeri merupakan komitmen dan rencana tindakan yang konkret. Komitmen dan rencana tindakan tersebut diputuskan oleh para pembuat keputusan untuk mengadaptasikan antara orientasi kebijakan luar negeri dengan situasi lingkungan eksternal, sehingga antara kondisi eksternal dapat konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Hal-hal yang termasuk dalam komitmen dan rencana tindakan yang konkret berupa tujuan yang spesifik serta instrumen dan metode untuk meraih tujuan tersebut. Rencana tindakan tersebut sebagai terjemahan dari orientasi umum dan reaksi terhadap keadaan eksternal yang terjadi (*immediate context*).

Rencana tindakan kebijakan luar negeri, terkait konteks tersebut (*immediate context*) akan menjadi acuan atau pedoman terhadap 1) Aksi terhadap kondisi yang berlangsung dalam waktu lama; 2) Aksi yang ditujukan kepada beberapa negara

tertentu; 3) Aksi yang dilakukan terhadap isu-isu khusus, seperti terorisme; 4) Aksi terhadap berbagai sasaran lain, sebagai contoh isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM), *global warming*, nuklir dan sebagainya.

Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behavior*). Fase atau tingkatan kebijakan luar negeri sebagai perilaku atau aksi berupa keputusan dan tindakan nyata yang dilakukan oleh *decision-makers* yang terkait erat dengan peristiwa serta kondisi di lingkungan eksternal. Tindakan-tindakan yang diambil dengan mengacu kepada orientasi umum serta sasaran yang lebih spesifik. Jadi, setiap negara mengkorelasikan negaranya dengan peristiwa dan situasi di luar lingkungan eksternalnya melalui ketiga bentuk kebijakan luar negeri tersebut di atas.

Keputusan dan tindakan politik luar negeri yang diambil dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari *external environment* maupun *internal environment*. Determinan politik luar negeri terbagi ke dalam dua kelompok (Howard Lentner. 1974). Pertama, determinan luar negeri/internasional, merujuk kepada sistem internasional dan situasi pada jangka waktu tertentu. Sistem internasional (*bi-polar*, *multi-polar*, *uni-polar*) merupakan pola interaksi di antara negara-negara yang terbentuk sebagai akibat struktur interaksi di antara pelaku-pelaku yang paling kuat (*most powerful actors/dominant actors*). Sedangkan, konsep situasi didefinisikan berupa pola-pola interaksi yang tidak terdapat dalam keseluruhan sistem

internasional. Sebagai contoh, pola hubungan di antara negara-negara Asia dan Pasifik yang terlibat dalam *Association Pacific Economic Community* (APEC) dapat dibahas sebagai suatu situasi. Selanjutnya, determinan domestik merujuk ke situasi dan kondisi di dalam negeri yang terbagi berdasarkan waktu untuk berubah, yaitu:

1. *Highly stable determinants*; merupakan kondisi dalam negeri yang mencakup luas wilayah geografi, lokasi, bentuk wilayah, iklim, jumlah populasi, serta sumber daya, khususnya sumber daya alam.
2. *Moderately stable determinants*; kondisi domestik yang berupa budaya politik, gaya politik dan kepemimpinan, serta proses politik.
3. *Unstable determinants*; merupakan sikap dan persepsi jangka panjang dan faktor-faktor ketidaksengajaan.

Sedangkan, Rosenau mengemukakan sumber relevan kebijakan luar negeri dan selanjutnya mengkategorikannya menjadi lima (James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, 1976). Pertama, variabel idiosinkratik yang merupakan sumber internal yang memperhatikan nilai-nilai, pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang akan mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Kedua, variabel peran yang berasal dari lingkungan eksternal dan biasanya diartikan sebagai aturan perilaku yang diharapkan. Dengan kata lain,

ekspektasi publik yang menimbulkan opini publik atas keputusan yang dipengaruhi, dirumuskan, dan dilaksanakan oleh para pembuat keputusan. Ketiga, variabel pemerintahan, di mana hal ini menyangkut kepada struktur, proses, dan dampak pemerintahan terhadap politik luar negeri.

Keempat, variabel sosial mencakup berbagai atribut nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem politik, ekonomi, dan sosial, lingkungan (berupa luas, geografis, tipe daerah, dan sumber alam), populasi penduduk (jumlah, densitas, dan statistik vital), *Growth National Product* (GNP), hasil pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, dan atribut lain terkait kapabilitas kekuatan suatu negara. Kelima, variabel sistemik, yang meliputi seluruh struktur dan proses sistem internasional, kebijakan dan tindakan negara lain yang dapat memunculkan respon politik negara.

Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Diplomasi adalah alat dalam mencapai kepentingan nasional dan dalam melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah diputuskan oleh sebuah negara. Dalam setiap masa kepemimpinan presiden, ada penetapan arah politik luar negeri yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi sebuah negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lingkungan eksternal Indonesia

mengalami perkembangan yang berbeda daripada keadaan atau situasi eksternal era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara dan tergabung ke dalam organisasi ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), Indonesia tidak terlepas dari penerapan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Kondisi situasi regional Indonesia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan pasar bebas pada khususnya di Asia Tenggara. Sistem internasional yang diwarnai dengan desakkan agenda globalisasi dan integrasi pasar global, terutama di bawah rezim perdagangan bebas *World Trade Organization* (WTO) juga membuat Indonesia harus memiliki strategi yang tepat dalam menjawab tantangan-tantangan di lingkungan internasional dan regional atau lingkungan eksternalnya.

Menghadapi tantangan pasar bebas di Asia Tenggara, Indonesia harus berbenah terutama dalam hal infrastruktur, deregulasi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing dan peningkatan kualitas produk. Belum lagi, Indonesia harus berbenah dalam berbagai persoalan ekonomi yang belum juga pulih benar selepas Krisis Moneter 1997. Hal tersebut menjadi tugas pemerintahan sekarang ini, bagaimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada khususnya dan memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai tujuan nasional Indonesia.

Belum lagi globalisasi pada saat ini merupakan kenyataan yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kerjasama perdagangan internasional di bawah aturan-aturan *World Trade Organization* (WTO) juga diarahkan menuju liberalisasi ekonomi, pada khususnya perdagangan barang dan jasa, tidak terkecuali bidang pertanian. Globalisasi dan integrasi pasar internasional yang diharapkan dan sangat dianjurkan akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara-negara, pada kenyataannya juga membawa kerentanan bagi perekonomian negara-negara yang ikut dalam arus liberalisasi dan integrasi pasar dunia. Hal ini menyebabkan negara-negara, tidak terkecuali Indonesia, harus lebih berhati-hati dan waspada dalam liberalisasi dan integrasi ekonomi. Berbagai kebijakan pada khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan juga tantangan dalam penerapan AFTA harus diputuskan secara seksama demi meraih kepentingan nasional.

Untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan luar negeri dengan penekanan kepada diplomasi ekonomi. Berbagai langkah kebijakan luar negeri pada praktiknya memberikan penekanan yang lebih kepada pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudirini, menekankan pentingnya perubahan paradigma dilakukan oleh para diplomat Indonesia. Hal

tersebut sesuai dengan Pernyataan Pers 2015 yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, berdasarkan visi dan misi politik luar negeri Presiden Widodo, politik luar negeri Indonesia akan difokuskan salah satunya untuk peningkatan diplomasi ekonomi.

Dalam mengantisipasi AFTA dan prioritas pembangunan serta pemberahan infrastruktur di Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak melakukan “diplomasi investasi” yaitu diplomasi yang dijalankan dalam beberapa kunjungan kenegaraan yang bertujuan untuk mencari investor asing yang bersedia menanamkan investasi di Indonesia. Sebagai contoh adalah ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Rusia pada 18-20 Mei 2016. Hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pebisnis Rusia, salah satunya adalah Perusahaan Rusia, *Russian Railways*, akan membangun rel kereta api di Kalimantan. Kesepakatan ekonomi juga tercapai ketika salah satu perusahaan Minyak dan Gas terbesar di Rusia, *Rosneft*, berkomitmen untuk membangun kilang di Tuban, Jawa Timur, senilai 176 Triliun Rupiah (*Detik Finance*, Tiga Hari di Rusia, Ini Hasil Kunjungan Jokowi, 21 Mei 2016).

Diplomasi ekonomi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tidak terbatas kepada upaya mencari investasi asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur di timur Indonesia. Joko Widodo juga mengangkat isu persoalan ekonomi, pada khususnya persoalan CPO (*Crude Palm Oil*) Indonesia. Ketika Presiden Joko

Widodo menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov ke Jakarta, Presiden Joko Widodo juga membahas mengenai ekspor CPO dan ikan. Presiden Joko Widodo berharap hambatan-hambatan *non tariff* akan ditiadakan (Rappler, Perkuat hubungan ekonomi, Presiden Putin Undang Jokowi ke Rusia). Dalam kunjungan lainnya ke Jerman, Joko Widodo berupaya untuk meningkatkan kerjasama dalam pendidikan vokasi (kejuruan) sebagai upaya peningkatan SDM Indonesia agar dapat mempersiapkan SDM Indonesia menuju era persaingan regional (*ASEAN Economic Community*) dan global (Presiden RI.go.id, Hari Pertama di Eropa, Presiden Joko Widodo Bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel, 20 April 2016).

Tantangan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Presiden Joko Widodo beserta jajarannya memiliki target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7-8 persen. Namun, menilik pernyataan *Lead Economist of World Bank*, Ndiame Diop, perubahan khususnya bidang ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih membutuhkan banyak upaya dan kerja keras, agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh dan mencapai level 5,5 persen per tahun. Pada realitanya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kurang mencapai kisaran 5 persen. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga mengalami peningkatan yang belum dapat dikatakan signifikan. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran hanya berkurang tidak sampai

satu persen. Akan tetapi, tingkat inflasi Indonesia berkurang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir sejak 2014 sampai dengan 2017 (Liputan 6, Terobosan Ekonomi 3 Tahun Jokowi-JK, 19 Oktober 2017).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pondasi ekonomi atau fundamental perekonomian Indonesia harus baik, sehingga sedikit kemungkinan Rupiah akan terpuruk terhadap dolar. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terus melemah dapat dihindari jika pondasi ekonomi dan fundamental perkonomian Indonesia kuat. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat beberapa waktu ini semakin terpuruk, dan bahkan pernah diperdagangkan di kisaran Rp 13.000 per dolar AS.

Hal yang harus dibenahi terkait lemahnya perekonomian adalah *political will* Pemerintahan Joko Widodo agar membuat kebijakan yang berpihak. Salah satunya adalah kebijakan untuk memperkuat daya saing produk Indonesia. Terlebih ketika 2015 AFTA sudah diberlakukan. Agar dapat bersaing, Indonesia harus bersiap. Hal ini karena daya saing di beberapa sektor industri utama Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2014-2015*, indeks daya saing Indonesia di tingkat global (*Global Competitiveness Index/GCI*) masih berada di peringkat 34 dari 144 negara.

Di lingkup ASEAN, peringkat Indonesia masih di bawah tiga negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Masing-masing berada di peringkat 2, peringkat 20, dan peringkat ke-3110. Berdasarkan data yang telah dijelaskan, masalah mendasar adalah fundamental ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Persoalan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia adalah dengan mulai menata perekonomian Indonesia, pada khususnya fundamental ekonomi yang kuat. Perlu dibuat kebijakan ekonomi yang efektif, seperti menggenjot ekspor, yang utamanya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk nasional Indonesia. Keseimbangan ekspor dan impor juga harus dijaga. Begitu juga stabilitas ekonomi dan keuangan harus diprioritaskan oleh Pemerintah.

Penutup

Berbagai langkah kebijakan luar negeri yang diambil oleh Joko Widodo terutama dengan penekanan kepada diplomasi ekonomi, tentunya harus disertai dengan perencanaan dan strategi yang matang terhadap apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi tersebut. Harus ada penguatan terutama dalam kapasitas para diplomat Indonesia untuk dapat mengetahui dan bahkan menguasai persoalan perekonomian Indonesia yang nantinya akan bermanfaat dalam upaya memperjuangkan diplomasi ekonomi Indonesia di forum-forum internasional.

Daftar Pustaka

Buku

Holsti, K.J. 1992. Politik International: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta.

Miriam Budiarjo. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar, Mas'oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

Morgenthau, Hans, J. 2010. "Politic Among Nations, the Struggle for Power and Peace", edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh S. Maimoen, A.M. Fatwan, Cecep Sudrajat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Letner, Howard. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach. Ohio: Bill and Howell Co.

Plano, Jack C., dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.

Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. World Politics: An Introduction. 1976. New York: The Free Press.

Sumber Internet

Angga Aliya ZRF, detikFinance, Tiga Hari di Rusia, Ini Hasil Kunjungan Jokowi, diunduh dari:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3214623/tiga-hari-di-rusia-ini-hasil-kunjungan-jokowi>, 20 Januari 2017, Pkl. 10.30 WIB.

Presiden RI.go.id, Hari Pertama di Eropa, Presiden Joko Widodo Bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel, diunduh dari:
<http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/hari-pertama-di-eropa-presiden-jokowi-bertemu-kanselir-jerman-angela-merkel.html>, 20 Januari, Pkl. 10.40 WIB.

